

**PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* ATAS HARTA  
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ANITA ANDRIANI**

NIM: 10100114094

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Andriani  
Nim : 10100114094  
Tempat/Tgl. Lahir : Bontokape Kab. Bima, 08 Juli 1997  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan/S1  
Fakultas/program : Syari'ah Dan Hukum/S1  
Alamat : Samata-Gowa  
Judul : Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* atas Harta Bersama di  
Pengadilan Agama Bima Kelas IB Perspektif Hukum  
Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.BM)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Agustus 2018

Penyusun,

Anita andriani

NIM: 10100114094

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)”, yang disusun oleh Anita Andriani, NIM: 10100114094, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Agustus 2018 M  
12 Dzulhijjah 1439H

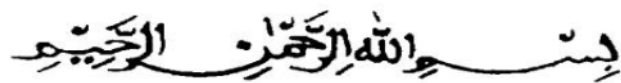
### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Patimah, M. Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamzah, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan shalawat kepada Nabiullah Muhammad saw. keluarga, dan para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas IB Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Musafir Pababbari,M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr.Darussalam, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.H.I. dan Dr.Hj. Patimah, M.Ag.,selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Peradilan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta tak lupa peneliti menghaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Hajati, S.H.I. selaku Staf Jurusan Peradilan.
4. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. dan Bapak Dr. Hamzah, M.H.I., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak mengarahkan dan membimbing peneliti dalam perampungan penulisan skripsi sampai tahap penyelesaian.
5. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. dan Dr. Musyfikah Ilyas, M.H.I. selaku penguji yang telah memberikan saran dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyempurnaan skripsi.
6. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung.
7. Dan yang terpenting skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda M.Ali Ahmad dan Ibunda Rukayah sebagai ungkapan terimah kasih tak terhingga karena telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang. Serta memberikan semangat kepada peneliti dan juga memberikan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Saudari terkasih Adek Nurul Mufarikah, kakak Sri Wulandari yang telah membantu memberi semangat baik do'a maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan saya, Yuliyanti,SH. ,Muhammad Ramadhan. Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan semangat, serta semua bantuannya selama ini.
10. Teman-teman angkatan 2014 khususnya Kelas Peradilan Agama B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kebersamaan dan bantuannya selama ini.

11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi dan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat bernilai ibadah disisi Allah swt.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Juli 2018

Penulis,

**Anita Andriani**

Nim. 10100114094



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii-iii
DAFTAR ISI .....	iv-v
PEDOMAN TRASNSLITERASI .....	vi-xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	10-38
A. Tinjauan Umum tentang <i>Conservatoir Beslag</i> .....	10
B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama .....	25
C. Sita Harta Bersama .....	24
D. Kerangka Konseptual .....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	39-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Instrumen Penelitian .....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
G. Pengujian Keabsahan Data .....	43
BAB IV SITA JAMINAN ( <i>CONSERVATOIR BESLAG</i> ) ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB..	45-90
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima Kelas IB .....	45
B. Proses Penyelesaian <i>conservatoir Beslag</i> dalam Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm .....	49
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm...	84
D. Analisis terhadap Proses Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> pada Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm .....	88

BAB V PENUTUP .....	91-92
A. Kesimpulan .....	91
B. Implikasi Penelitian .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93-94
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	96





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَآتَ mata

رَمَى rama

قِيلَ qila

يَمُوتُ yamutu

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

وَضَعُوهُ الْأُفْلَ mudal al-at fal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbana*

نَجَّيْنَا *najjainah*

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "I" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ *al-falsafah*

الْبِلَادُ *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمِرتُ *umirtu*

2. Hamzah tengah

مُرُونَا 'muruna

### 3. Hamzah akhir

يَايُؤَيُّنْ 'un

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ هُمْ rahmatillah

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama : Anita Andriani**  
**NIM : 10100114094**  
**Judul : Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah Proses pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)? selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Proses penyelesaian pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama pada putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm?, 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta bersama dalam putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu Putusan perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Jurusita Pengganti, dan Panitera Muda Hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB dalam putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm telah sesuai dengan Hukum Acara yang Berlaku, dimana sita jaminan dilaksanakan pada tanggal 8 september 2017 setelah tahap pembacaan gugatan, yang didasarkan dengan penetapan Majelis Hakim untuk dilakukan penyitaan, kemudian jurusita pengganti di perintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa, setelah dilakukan penyitaan tersebut, kemudian Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan. Dalam Tinjauan Hukum Islam termasuk dalam kategori *maslahah al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia untuk mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadaran manusia yang bersifat sangat luas, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-Hajr* berartinya membatasi dalam mempergunakan sebagian harta.

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa Harta Bersama, para pihak harus lebih mengutamakan pembagian secara musyawarah mufakat dan komunikasi yang baik. 2) Apabila telah terjadinya perceraian antara suami isteri, hendaknya Harta bersama yang telah di peroleh selama perkawinan tersebut segera dibagi sebelum Harta Bersama tersebut dikuasai oleh salah satu Pihak, dipindahtangankan/ dialihkan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan Hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan putusan yang hampa karena tidak dapat di eksekusi akibat dari tindakan pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang-barang sengketa atau barang-barang yang dijadikan jaminan dalam perkara.

Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut, maka hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan.

Sita atau *beslag* adalah suatu tindakan Hukum oleh Hakim yang bersifat Eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminanan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tujuan sita adalah untuk menjamin Hak bagi pemohon sita maka sita disebut juga “*SITA JAMINAN*”.<sup>1</sup>

Dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta, demikian pula apabila

---

<sup>1</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 69-70.

terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi Hak istri dan mana yang menjadi hak suami, jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik dalam islam menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun apabila tidak terselesaikan dengan baik, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang di atur dalam undang-undang. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, peradilan Agama mengacu pada konstitusi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 yang di Undangkan pada tanggal 29 Desember 1989, peradilan Agama mempunyai wewenang penuh atas kompetensi relatif maupun absolut, salah satu kompetensinya adalah masalah penyitaan.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar terhadap kewenangan

---

<sup>2</sup>Zainudin Ali, Hukum Islam; *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 92.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 104.

Peradilan Agama. Beban tugas menjadi luas dan sangat berat karena tidak lagi didasarkan pada Stb. 1882 Nomor 152 jo Stb. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, Stb. 1937 Nomor 638, dan Nomor 639. Dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dilingkungan peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam peraturan undang-undang tersebut, maka ketentuan tentang sita dan penyitaan mengikuti apa yang tersebut dalam HIR dan R.Bg. oleh karena itu, segala hal yang berbunyi peradilan Negeri dalam peraturan itu haruslah dibaca Peradilan Agama. Demikian juga segala hal yang berbunyi Pengadilan Tinggi hendaknya dibaca Pengadilan Tinggi Agama.

Mengingat dengan hal-hal yang berkenaan dengan sita dan kejurusitaan ini merupakan hal yang baru di lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam hal praktik pelaksanaan sita yang sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan penerapan sita yang rumit dan komplek. Dalam pasal 38-42 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan bahwa disetiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan beberapa orang jurusita pengganti. Juru sita dan jurusita pengganti adalah pegawai umum yaitu pegawai Negeri yang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas kejurusitaan di pengadilan Agama dimana dia bertugas atau ditempatkan. Tentang Tugas jurusita dan jurusita pengganti diatur dalam pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Tuga-tugas tersebut sangat penting

dan wajib dilaksanakan oleh jurusita dan jurusita pengganti karena berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang sedang di proses dalam persidangan atau tugas-tugas lain setelah perkara itu di putus. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pelaksanaan tugas jurusita dan jurusita pengganti akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI, akan tetapi pelaksanaan tugas yang dimaksud sampai sekarang belum terbit, sehingga sampai sekarang peraturan-peraturan yang terdapat dalam HIR dan R.Bg masih tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tugas dan kewajiban jurusita termuat dalam pasal 388-391 HIR dan pasal 209-222 R.Bg.<sup>4</sup>

Pelaksanaan sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh ketua pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa di mohonkannya sita jaminan. Panitera atau jurusita sebagai pelaksana pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah di atur dalam HIR pasal 197-199.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan Berita Acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindah tanggungan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h. 98-101.

Masalah Harta Bersama biasanya berupa Harta yang *riil* dan statusnya sudah Jelas seperti rumah, tanah, mobil dll. Pembagian harta bersama kadang-kadang menjadikan konflik karena masing-masing tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya seperti dalam kasus di pengadilan Agama Bima Nomor perkara 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Atas permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai harta bersama dalam hal ini penggugat/mantan istri mengajukan gugatan terhadap tergugat (mantan suami) dan memohon kepada pengadilan agama Bima supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) dalam putusan Sela terhadap barang-barang yang disengketakan sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagi menjadi dua bagian terhadap Harta Bersama tersebut, penggugat khawatir akan dialihkannya barang-barang tersebut oleh Tergugat, maka di mohonkanlah untuk diletakkan sita jaminan atas Harta Bersama oleh penggugat.

Belum jelasnya undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta Bersama di pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya pengadilan Agama mengacu pada landasan Hukum dalam peradilan Umum. Demikian juga tidak jelasnya landasan Hukum Islam sebagai dasar dalam melaksanakan sita jaminan di Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dalam Hal belum jelasnya pelaksanaan sita jaminan dalam pandangan Hukum Islam. Maka Penyusun memilih penelitian pada Pengadilan Agama Bima, didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus yang akan penyusun lakukan penelitian ialah pernah terjadi, dan diselesaikan pada pengadilan tersebut. Maka penyusun mencoba untuk meneliti mengenai:

---

<sup>5</sup>Muhammah Misbahul Munir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di Pengadilan Agama Sleman*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 4.

Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di pengadilan Agama Bima (putusan perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) tersebut.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
2. Harta Bersama
3. Sita Harta Bersama

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka akan dideskripsikan dari fokus penelitian ini yaitu:

- a. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.
- b. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

- c. Sita Harta Bersama adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada pada suami maupun yang berada pada isteri dalam perkara perceraian atau gugatan harta bersama.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah yaitu “Bagaimana proses pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama dalam tinjauan hukum Islam (Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm). Penulis merumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama pada putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama dalam putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, masalah sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sesungguhnya telah banyak di tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu:

1. M. Yahya Harahap dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata”, 2013. pada garis besarnya buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) besar. Pada

bab 8 (delapan) tentang Penyitaan, membahas secara rinci mengenai pengertian dan tujuan penyitaan, beberapa prinsip pokok sita, sita revindikasi, sita jaminan, (*Conservatoir Beslag*), dan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*).

2. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri atas kepemilikan harta dalam perkawinan), 2015. Buku ini mengkaji mengenai hak dan kedudukan yang setara dari suami istri terkait kepemilikan harta dalam perkawinan. Di dalamnya juga diuraikan mengenai kedudukan harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan campuran serta kedudukan harta bersama sebagai benda sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit.
3. H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, tahun 2005. Buku ini membahas tentang, eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia, telah ada sejak jaman penjajah belanda. Bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di nusantara, karena lembaga peradilan baik dalam teori maupun praktek kehidupan umat Islam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun pemantapan posisi peradilan agama di Indonesia secara yuridis formal terjadi setelah lahirnya UU No. 7 tahun 1989 yang menempatkan lembaga peradilan agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain (peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan Tata usaha Negara).
4. Bambang Sugeng A.S., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi”, dalam buku ini selain membahas berbagai macam masalah keperdataan, buku ini mengupas banyak mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) , makna dan macam-



macam sita jaminan, perbedaan dari macam-macam sita jaminan, kewajiban jurusita dan prosedur pelaksanaan sita jaminan.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama di Pengadilan Agama Bima putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama di Pengadilan Agama Bima pada putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya sita jaminan atas harta bersama.
2. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan UIN Alauddin Makassar.
3. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan hakim yang akan datang dan pihak yang bersengketa, khususnya dalam pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama di pengadilan agama.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Sita atau *beslag* ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh opemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sita adalah tuntutan pengadilan, perihal mengambil dan menahan barang-barang dan sebagainya yang dilakukan menurut keputusan hakim atau oleh polisi.<sup>2</sup>

Sita atau penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap

---

<sup>1</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 69.

<sup>2</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. XII; Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 1134.

<sup>3</sup>Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 167.

ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi landasan yuridis atau dasar hukum dari sita jaminan yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1)

R.Bg yang berbunyi:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Pada hakikatnya sita jaminan ini merupakan perampasan atas harta sengketat atau harta kekayaan Tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Perampasan atas Harta Tergugat bisa bersifat permanen jika sita itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang. Perampasan juga bisa bersifat permanen jika sita yang telah diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh Hakim untuk diangkat.<sup>5</sup>

Selain HIR dan RB.g yang mengatur tentang sita jaminan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi Negara perihal sita jaminan

---

<sup>4</sup>Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h.167.

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. Ke-VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 102.

(*Conservatoir Beslag*), walaupun SEMA ini bersifat memperingatkan hakim agar berhati-hati dalam menerapkan lembaga sita jaminan baik yang berhubungan dengan syarat-syarat maupun cara pelaksanaannya.

*Conservatoir Beslag* dalam Kamus Hukum Lengkap memiliki makna sita yang diajukan untuk menyimpan hak-hak tergugat untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat.

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum sita jaminan selain yang terdapat dalam HIR, RB.g dan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dilihat dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang disebut dengan *masalahah mursalah*.

Menurut Prof. DR. Rachmat Syiafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti *masalahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-unsur Sita

Dalam sita jaminan terdapat beberapa Unsur<sup>7</sup>, yaitu:

### a. Pemohon sita

Pemohon sita ialah pihak dalam sengketa yang mempunyai alasan sita, yaitu kekhawatiran terhadap kepentingannya yang akan dirugikan oleh tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan terhadap obyek sita dalam

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 117, dikutip dalam Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.Pdf , h. 19-20 digilib.uinsby.ac.id (02 Mei 2018).

<sup>7</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 72-76.

perkara. Pemohon sita lazimnya adalah pen ggugat, namun demikian tergugat pun juga dimungkinkan untuk mengajukan sita.

b. Permohonan sita

Permohonan sita diajukan kepada pengadilan Agama yang memeriksa perkara. Apabila perkara sudah berada ditingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada pengadilan tinggi agama yang memeriksa perkara, melalui pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama, dan apabila perkara sudah dalam tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama. Permohonan sita harus dibuat secara tertulis, dan bagi yang buta huruf harus di proses menurut pasal 120 HIR.

Permohonan sita harus menyebutkan :

- 1) Pihak-pihak dalam perkara
- 2) Alasan-alasan permohonan sita
- 3) Barang-barang yang dimohonkan sita
- 4) Petitum sita

c. Obyek Sita

Obyek sita ialah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang setelah disita dapat disebut barang sitaan. Pada prinsipnya semua barang sengketa dapat disita kecuali *barang dan perkakas* yang secara nyata dipergunakan sebagai alat untuk menjalankan pencaharian sehari-hari (Pasal 197 ayat (8) HIR, pasal 211 R.Bg).

d. Tersita

Tersita ialah Tergugat/Termohon atau pihak yang menguasai benda obyek sita dan pihak ketiga tidak dapat menjadi tersita.

e. Hakim

Yang berwenang menetapkan perintah sita adalah Hakim yang memeriksa perkara, yaitu hakim Tunggal atau ketua majelis. selain Hakim/Ketua Majelis tidak berwenang menetapkan perintah sita

f. Pelaksana sita

Pelaksana sita ialah panitera pengadilan Agama, dibantu oleh dua orang sebagai saksi. Apabila panitera berhalangan dapat diganti oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh panitera.

### 3. Macam-macam Sita

Sita terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Sita *Revindicatoir*
- b. Sita *Conservatoir*
- c. Sita *Marital*
- d. Sita *Eksekusi*

Berdasarkan pembagian macam-macam sita di atas maka akan diuraikan satu persatu dari sita tersebut sebagai berikut:

Pertama, Sita Revindikasi atau *Revindicatoir beslag* adalah sita terhadap barang bergerak yang diajukan oleh pemilik barang (*owner's claim*) yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Sita Revindikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat;
- 2) Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh tergugat secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak berhak atasnya;

- 3) Obyek sita revindikasi ini hanya terbatas pada benda bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik.<sup>8</sup>

Kedua, *Conservatoir beslag* atau sita jaminan adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang bertujuan untuk member jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau jharta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu member jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.<sup>9</sup>

Diatur dalam Pasal 227 Jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 Jo. Pasal 208 RB.g yang intisari pengaturannya yaitu<sup>10</sup>:

- a. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya itu.
- b. Barang yang disita itu adalah kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat.
- c. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis.
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Ketiga, Sita Harta Perkawinan (*Maritale Basleg*) sebenarnya sama dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dia merupakan pengkhususan yang

---

<sup>8</sup>Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h.167-168.

<sup>9</sup>Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105.

<sup>10</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. Ke-III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 76-77.

hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan *marital beslag* timbul apabila terjadi perceraian antara suami isteri, selama perkara perceraian masih diperiksa di pengadilan agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan.<sup>11</sup>

Tujuan utamanya membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan demikian, pembekuan harta bersama di bawah penyitaan berfungsi mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.<sup>12</sup> Mengenai sejauh mana tindakan pengamanan dalam sita harta bersama dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 832 Rv yang meliputi:

1. Penyegehan
2. Pencatatan
3. Penilaian harta bersama
4. Penyitaan harta bersama

Keempat, *Executorial Beslag* atau sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan huku tetap, meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 106.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. Ke-XIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 369.



tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Adapun ciri-ciri sita eksekusi adalah:

- a. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan Peradilan mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
- b. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan peradilan Agama yang berakhir dengan tindakan pelelangan
- c. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
- d. Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan ketua pengadilan agama bukan atas perintah ketua majelis hakim dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.<sup>14</sup>

## 5. Tujuan Sita Jaminan

Tujuan sita ialah untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan, dan putusan hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada, rusak atau dipindah tangan pada pihak ketiga.<sup>15</sup>

Selain itu juga sita bertujuan untuk mengamankan objek sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 105.

<sup>14</sup> Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h. 170.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 71.

sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Adapun tujuan dari penyitaan itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

a. Menjaga barang yang disengketakan

Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibaan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya di sini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat.

b. Agar gugatan tidak hampa

Selain untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak illusior atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.

---

<sup>16</sup> Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h. 167.

<sup>17</sup> Fadli Akbar, *Tinjauan Hukum tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata*, Jurnal Penelitian (Fak. Hukum Universitas Tadulako) [Jurnal.untad.ac.id/>article](http://Jurnal.untad.ac.id/>article) (diakses tanggal 1 Mei 2018).

## 6. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

Pedoman dalam pelaksanaan sita adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975<sup>18</sup>, yang memerintahkan kepada hakim agar dalam pelaksanaan sita supaya:

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
- c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

---

<sup>18</sup>SEMA No. 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 1 Desember 1975.

- f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (*Agraria*) atau Pejabat yang bertugas membuat akta jualbeli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;
- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Selain pedoman penyitaan tersebut, juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip sita dan penyitaan sebagai berikut:

1. Harus ada persangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal untuk menjual, memindahkan atau mengalihkan barang-barangnya.
2. Barang yang dimintakan penyitaan kepunyaan tergugat atau kepunyaan sendiri (jelas kepemilikannya).
3. Permohonan di ajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkaranya.
4. Objeknya terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak.
5. Sekedar cukup untuk memenuhi pembayaran tuntutan atau hutang.<sup>19</sup>

Tata cara penyitaan dapat dikemukakan secara garis besar sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup>Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h. 172-173.

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan
  - 1) Surat penetapan sita dibuat oleh Ketua atau Majelis Hakim yang bersangkutan.
  - 2) Surat penetapan berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita terhadap objek yang disebutkan dalam surat penetapan.
- b. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita
  - 1) Berdasarkan pasal 197 ayat 2 HIR, perintah menjalankan sita ditujukan kepada panitera dan dapat diganti apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya.
  - 2) Dalam praktik, dengan adanya jabatan fungsional juru sita atau juru sita pengganti berdasarkan pasal 38 jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perintah melaksanakan penyitaan tersebut dapat langsung diberikan kepada juru sita atau juru sita pengganti yang di tunjuk dalam surat penetapan.
- c. Pemberitahuan penyitaan
  - 1) Secara formal penyitaan harus diberitahukan kepada termohon sita atau tergugat dan hal ini bersifat imperative.
  - 2) Pemberitahuan tersebut berisi:
    - (a) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sita.
    - (b) Menyebutkan barang dan tempat penyitaan.
    - (c) Agar menghadiri pelaksanaan sita
- d. Jurusita dibantu oleh 2 orang saksi
  - 1) Saksi-saksi tersebut disebutkan Nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggalnya dalam berita acara penyitaan

---

<sup>20</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 106-108

- 2) Saksi harus penduduk Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya
- e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang
- 1) Juru sita dan saksi datang ke tempat barang yang akan di sita.
  - 2) Penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang berada adalah tidak sah.
- f. Membuat Berita acara penyitaan
- Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam Berita acara penyitaan yaitu:
- 1) Nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat penetapan perintah sita sebagai dasar pelaksanaan sita.
  - 2) Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pelaksanaan penyitaan.
  - 3) Nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi-saksi.
  - 4) Jumlah barang yang disita dijelaskan secara rinci.
  - 5) Apabila tergugat (termohon sita) hadir dijelaskan bahwa berita acara dibuat di hadapannya, apabila tidak hadir juga dicatat juga dalam berita acara penyitaan.
  - 6) Penegasan bahwa penjagaan objek sita diserahkan kepada tergugat/termohon sita.
  - 7) Berita acara ditandatangani oleh juru sita dan saksi-saksi.
- g. Pendaftaran sita
- 1) Mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang untuk itu.
  - 2) Apabila barang yang tidak bergerak berupa tanah bersertifikat didaftarkan kepada badan Pertanahan Nasional. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat dicatatkan dalam buku Letter C di kantor Lurah/Desa.
- h. Menempatkan barang sitaan di tempat semula

- 1) Penjagaan sita atas barang bergerak atau tidak bergerak diserahkan kepada tergugat/termohon sita.
- 2) Dilarang mengalihkan maupun menyerahkan penjagaan dan penguasaan kepada pemohon sita (penggugat) atau kepada pihak ketiga maupun kepala desa.
- 3) Termohon sita berhak memakai, menikmati, dan mengoperasikan kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali apabila pemakaian itu berakibat barang sitaan menjadi habis dalam pemakaian.

#### **7. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Penyitaan**

Adapun Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penyitaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilarang jurusita melakukan penyitaan terhadap Hewan dan Perkakas.

Yang dikategorikan sebagai hewan disini adalah hewan yang mempunyai sifat “sungguh-sungguh” dipergunakan sebagai alat mencari pencarian, lain halnya dengan hewan yang diperdagangkan atau hewan yang menghasilkan komoditi dagang seperti susu, untuk ini dapat di letakkan sita jaminan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkakas di sini yaitu perkakas yang sifat dan wujudnya dipergunakan langsung oleh seseorang untuk mencari nafkah seperti cangkul, parang, gergaji, pahat dan sebagainya (vide pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 R.Bg).

- b. Dilarang panitera/Juru sita melakukan penyitaan yang melampaui jumlah tagihan.

Tindakan penyitaan yang melampaui jumlah tagihan adalah menyimpang dari asas penyitaan sebagai jaminan pelunasan utang. Tindakan ini dapat dianggap pemerkosaan Hukum terhadap kepentingan tergugat. Oleh karena

itu , tindakan penyitaan itu harus tetap berpegang kepada asas proporsional supaya tetap terpelihara batas-batas yang bermoral dan tidak terkandung unsur balas dendam atau tindakan yang tidak masuk akal lainnya. Penyitaan diluar barang yang disengketakan di anggap tindakan yang melampaui kewenangan peradilan Agama.

c. Dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga

Sita jaminan hanya dibenarkan terhadap milik pribadi tergugat sendiri. Ini sesuai dengan sifat pertanggungjawaban hukum. Hanya dapat dibebankan kepada orang-orang yang benar-benar ada hubungan hukumnya dengan pihak tergugat. Itulah sebabnya dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik pihak ketiga. Larangan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik pihak ketiga ini tidak terbatas atas barang milik yang nyata-nyata atas nama pihak ketiga, akan tetapi meliputi barang hak milik pihak ketiga yang masih tercantum atas nama penggugat. Misalnya, tanah sudah dijual tergugat kepada pihak ketiga tetapi pihak ketiga itu belum sempat mengurus sertifikat tanah itu pada instansi yang berwenang sehingga tanah tersebut masih atas nama tergugat.

d. Dilarang panitera/jurusita melakukan penyitaan dibelakang meja

Penyitaan yang dilakukan oleh panitera/juru sita dengan tidak hadirnya ketempat barang yang disita berada dianggap tidak sah. Pelaksanaan sita yang benar adalah panitera/juru sita harus hadir ketempat lokasi penyitaan dilakukan dan disaksikan sendiri dan mengamati secara seksama barang-barang yang akan diletakkan sita. Jika barang-barang yang diletakkan sita itu menyangkut barang-barang tidak bergerak, maka panitera/ juru sita diwajibkan melakukan pengukuran atas luasnya dan mencermati batas-batasnya terhadap barang-barang tidak bergerak itu.



- e. Larangan menyerahkan penyimpanan dan penjagaan barang yang disita (sita jaminan) kepada penggugat.

Panitera/juru sita dilarang menyerahkan penyimpanan barang yang disita kepada penggugat karena hal ini bertentangan dengan hukum dan tujuan sita. Oleh karena itu perlu dipedomani bahwa barang-barang yang telah disita oleh panitera/juru sita hendaknya penyimpanan dan penjagaannya diserahkan kepada tergugat sebagaimana keadaan semula. Barang-barang yang idista itu harus berada ditempat sebagaimana barang-barang itu berada pada waktu dilaksanakan sita. Ketentuan ini sebagaimana telah dikemukakan dalam pasal 197 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg bahwa barang-barang yang disita itu harus tetap berada ditangan tergugat sebagaimana keadaan sewaktu sita dilaksanakan.

- f. Larangan pemakaian uang yang disita

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa tujuan dari penyitaan adalah menempatkan barang-barang yang disita itu tetap utuh, agar kelak pada saat putusan peradilan Agama memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat dijadikan pemenuhan dan jaminan dari apa yang menjadi gugatan, sehingga putusan itu tidak menjadi hampa. Oleh karena itu sangat logis untuk melarang pemakaian atas uang yang disita itu untuk siapapun.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta Bersama merupakan salah satu harta dari banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, oleh karenanya di sini akan dikemukakan beberapa pengertian harta bersama.

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 113-117.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”<sup>22</sup>

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut

- a) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>23</sup>

Harta bersama telah dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 huruf f yang berbunyi:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>24</sup>

Dalam hukum adat bahwa harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta

---

<sup>22</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. Ke-II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 342.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. Ke-IV; Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 56.

<sup>24</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan isteri, dan barang-barang hadiah.<sup>25</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun *gono gini* tidak diatur dalam *fiqh* Islam secara jelas, tetapi keberadaannya paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka.<sup>26</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi *yurisdiksi* harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.<sup>27</sup>

Yurisprudensi peradilan agama juga menjelaskan bahwa harta bersama harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara suami atau istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Dari beberapa pendapat di atas yang mengemukakan atau menjelaskan mengenai harta bersama maka dapat dianalisis bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan.

---

<sup>25</sup>Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan* (Cet. Ke-I; Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 7.

<sup>26</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Ed. II, Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 179

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap dikutip dalam Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, h. 7.

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

Segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Nisaa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>28</sup>

Adapun Asbabun Nuzul ayat 32 yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ummu Salamah bahwasanya kaum laki-laki turut berperang sedangkan kaum perempuan tidak. Oleh karena itu menurutnya, hendaklah perempuan mendapat setengah dari harta warisan, sebab orang yang berperang akan mendapat bagian yang lebih besar dari ganimah (harta rampasan). Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan agar masing-masing ridha terhadap bagiannya.<sup>29</sup>

Isyarat dari penegasan ayat di atas, yang dijadikan sumber acuan pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 Adanya harta bersama dalam

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 84.

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dan dalam Pasal 86 dijelaskan bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah , shadaqah, dan/atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 89 KHI Suami bertanggung jawab atas harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. Ke-IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 57-58.

- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 91 KHI di atas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini. Saat ini ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain). Oleh karena itu pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk nonmateri berupa jasa dan sebagainya. Yang penting adalah penggunaan kekayaan yang dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Kalau kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama:

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memin-dahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 Kompilasi Hukum Islam.<sup>31</sup>

### 3. Ruang Lingkup Harta Bersama

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. Ke-4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

Adapun ruang lingkup Harta Bersama, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH. Yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan.

- b. Harta yang dibeli dan di bangun pascaperceraian yang dibiayai dari Harta Bersama.

Suatu barang termasuk *yurisdiksi* harta bersama atau tidak di tentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu di beli atau di bangun pasca terjadinya perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan mempunyai *deposito*. Kemudian terjadi perceraian. *Deposito* tersebut dikuasai oleh suami, dan belum dilakukan pembagian. Dari *deposito* tersebut suami membangun rumah. Di sini rumah tersebut termasuk dalam *yuridiksi* harta bersama. Penerapan yang demikian ini sejalan dengan jiwa putusan MA No. 803/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa apa saja yang dibeli , jika uang pembelian itu berasal dari harta bersama, menjadi *yuridiksi* harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam Ikatan Perkawinan.

Ini sangat relevan dengan kaidah hukum mengenai harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya

---

<sup>32</sup>Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 315-318.

menjadi harta bersama. Namun dalam banyak kasus sengketa harta bersama berjalan tidak semulus dan sesederhana yang dibayangkan banyak orang.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Ini adalah suatu hal yang logis adanya. Tetapi bukan hanya barang yang berasal dari harta bersama saja yang menjadi yurisdiksi harta bersama, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau isteri.

e. Segala penghasilan pribadi suami/isteri

Patokan ini sesuai dengan putusan MA No. 454/K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa segala penghasilan suami isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, menjadi yurisdiksi harta bersama suami isteri.

#### 4. Jenis-Jenis Harta Bersama

Mengenai jenis harta bersama, bahwa harta bersama yang dimiliki oleh suami istri dari segi hukum telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:<sup>33</sup>

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

---

<sup>33</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 12.



penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Kompilasi Hukum Islam

### C. *Sita Harta Bersama (Sita Marital)*

#### 1. Pengertian Sita Harta Bersama

Kata sita marital mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga *marital macht* sebagaimana selama ini digariskan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 KUH Perdata, yang menegaskan<sup>35</sup>:

- a. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri:
  - 1) Memberi bantuan kepada isteri menghadap di muka pengadilan
  - 2) Mengemudikan harta milik pribadi
- b. Setiap istri harus tunduk patuh kepada suami.

Sita harta bersama atau *maritale beslag* adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada pada suami maupun yang berada pada isteri dalam perkara perceraian atau gugatan harta bersama.<sup>36</sup>

Menurut Yahya Harahap sita marital atau sita harta bersama memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami isteri

#### 2. Dasar Hukum Sita Harta Bersama

Ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sita harta bersama yaitu:

- a. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP Nomor 9 tahun 1975<sup>37</sup>

Pasal tersebut berbunyi bahwa;  
 “selama berlangsung gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 368.

<sup>36</sup> Halim Talli, *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama yang Mandiri*, h. 169.

<sup>37</sup> PP tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan tanggal 1 1975, LNRI Tahun 1975, No. 12.

bersama suami isteri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak isteri”<sup>38</sup>.

Menurut pasal ini, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu dan menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri. Dari segi redaksi, ketentuan ini lebih tegas dari Pasal 190 KUH Perdata karena di dalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan antara keduanya. Sama bernmaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama tidak jatuh pada pihak ketiga.<sup>39</sup>

b. Pasal 78 Huruf c UU No. 7 Tahun 1989<sup>40</sup>

Bunyi pasal ini sama persis dengan Pasal 24 ayat 2 huruf c PP No. 9 Tahun 1975. Yang penting dicatat, berdasarkan Pasal 78 huruf c, peradilan agama pun telah memiliki aturan hukum positif tentang lembaga sita harta bersama (sita marital). Bahkan sita tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>41</sup>, yang sama bunyi redaksinya Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989. Dengan

---

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 370.

<sup>40</sup>Undang-Undang tentang Peradilan Agama, diundangkan tanggal 29 Desember 1989, LNRI 1989, No. 49.

<sup>41</sup>Dinyatakan berlaku berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

demikian, landasan penerapan sita harta bersama di lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

### 3. Lingkup Penerapan Sita Harta Bersama

Jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami isteri.<sup>43</sup>

Adapun ruang lingkup penerapan sita harta bersama yaitu<sup>44</sup>:

#### a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami isteri, hokum memberikan perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta pada pihak ketiga.

#### b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Secara hukum, perkara yang mungkin timbul antara suami-isteri yang erat kaitannya dengan harta bersama, bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen

---

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 370.

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 371.

<sup>44</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 371-374.

meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta

Sita harta bersama dapat diterapkan penegakannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama. Penerapan tersebut didasarkan pada Pasal 186 KUH Perdata dan juga dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

- 1) Suami atau istri dapat meminta sita harta bersama atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.
- 2) Hal itu dapat diminta apabila suami atau isteri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti perjudian, pemborosan dan sebagainya.

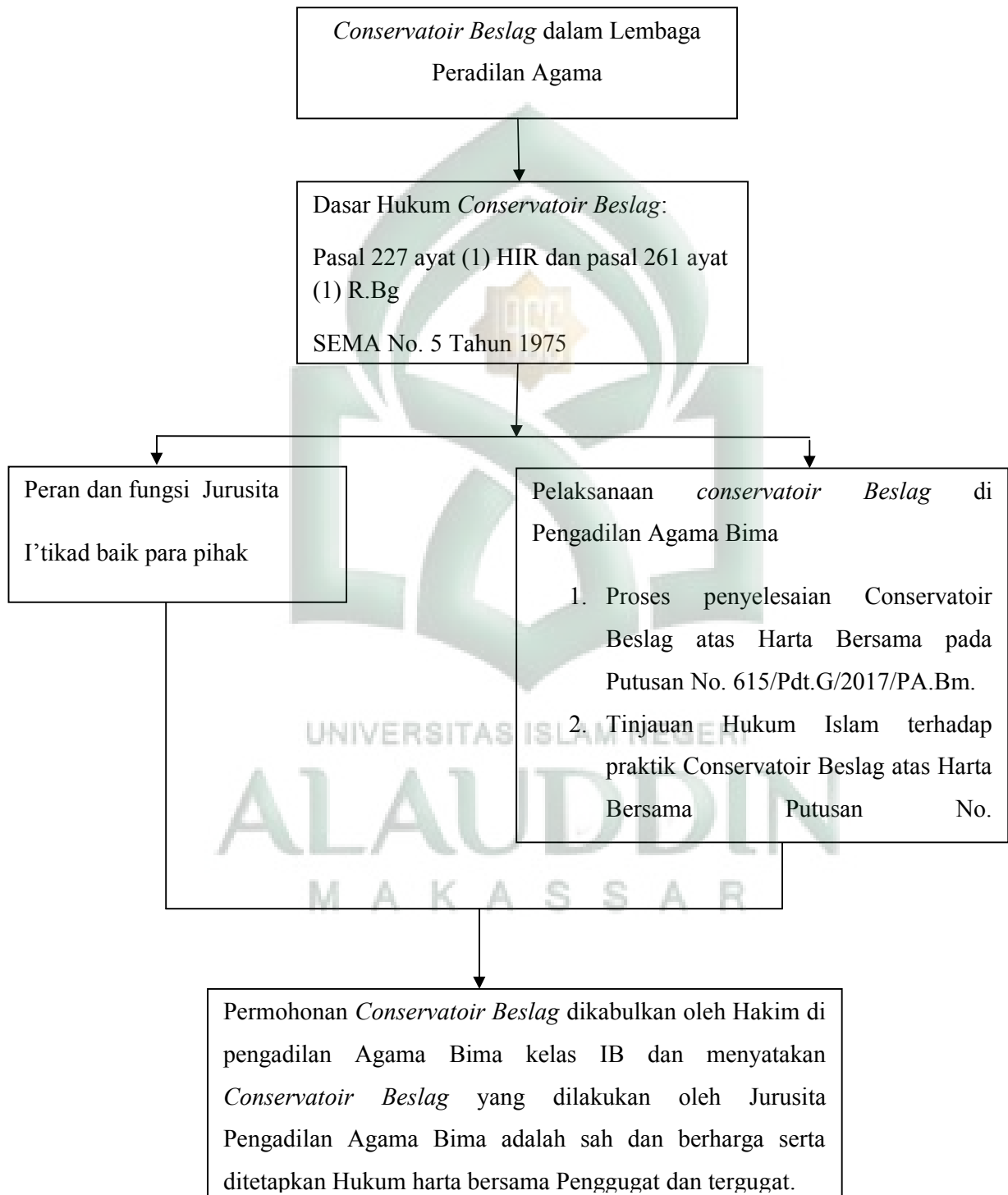
#### 4. Sita Meliputi Seluruh Harta Bersama

Penerapan sita harta bersama, meliputi seluruh harta bersama. Tidak dibenarkan secara parsial, hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai tergugat saja. Hal itu sesuai dengan pengertian dan tujuan sita itu sendiri. Pembekuan seluruh harta bersama, baik yang ada ditangan penggugat atau tergugat. Dengan kata lain, sita marital adalah sita terhadap seluruh harta bersama secara total, baik yang ada ditangan suami atau isteri Tujuan pembekuan harta melalui sita marital agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Bukan ditujukan untuk menjamin utang atau penyerahan barang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 375.

#### D. Kerangka Konseptual.



### **BAB III**

#### **METEDOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yang diteliti dalam putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima kelas 1B karena pengadilan tersebut mempunyai wewenang menangani permohonan sita jaminan oleh salah satu pihak yang berperkara, Pengadilan Agama Bima Kelas 1B memudahkan penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. *Pendekatan Normatif* yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pemikiran paratokoh yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminana yang mengangkat kasus dari putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. *Pendekatan Yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### C. *Sumber Data*

#### 1. Data Primer<sup>1</sup>

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,<sup>2</sup> diantaranya adalah sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara harta bersama No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm, dan SEMA No. 5 Tahun 1975.

#### 2. Data Sekunder<sup>3</sup>

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 3. Data Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

### D. *Metode Pengumpulan Data*

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas I B, Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan putusan.

---

<sup>1</sup>Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

<sup>3</sup>Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya ,h. 30.



## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bima Kelas IB guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sita jaminan atas harta bersama.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perkara harta bersama, seperti akta perdamian, putusan pengadilan, laporan perkara yang masuk dan diputus tahunan, dan lain sebagainya.

## E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *kualitatif*, yang menjadi instrumen penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “*diujivalidasi*”. Uji *validasi* merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan *valid* apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan.

Peneliti *kualitatif* sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>4</sup>

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana proses pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama ditinjau dari hukum Islam. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu salah satu *instrumen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Bima Kelas IB. Selain dari pada itu peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam suara (*handphone*), serta alat tulis menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Yang dimaksud di sini adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

##### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 240

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan penjelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung.<sup>5</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data *kualitatif* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.<sup>6</sup>

### G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

#### 2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi *kredibel* atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 95.

penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



**BAB IV**

**SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) ATAS HARTA BERSAMA  
DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB**

***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima Kelas I B***

**1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima (Mbojo)**

Sejarah Pengadilan Agama Bima (*mbojo*) erat hubungannya dengan datangnya Islam di pulau sumbawa dan sejarah kerajaan Bima (*mbojo*) itu sendiri. Oleh karena kedatangan Islam di Bima (*mbojo*) terjadi sejak zaman kolonial belanda.

Setelah kemerdekaan, sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya pada mulanya Pengadilan Agama Bima (*mbojo*) ‘bagian’ merupakan Kantor Departemen Agama kabupaten Bima (*mbojo*). Dengan terbitnya Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, maka bersama 32 Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bima secara hukum resmi terbentuk. Sekalipun demikian secara *de facto* gedung Pengadilan Agama Bima (*mbojo*) baru berdiri pada tahun 1976.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bima:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura.
- 2) Penetapan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima (*Mbojo*)

### VISI

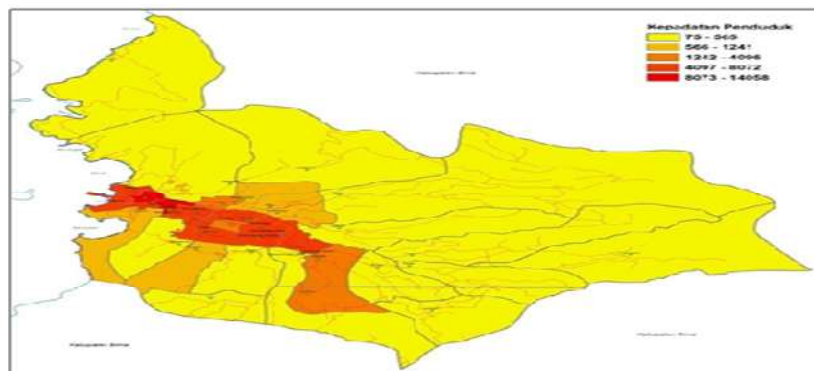
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas , etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik”.

### MISI

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain;
- 3) Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses keadilan;
- 5) Mewujudkan pengadilan agama yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

## 3. Wilayah Yurisdiksi

### Kota Bima (*Mbojo*)

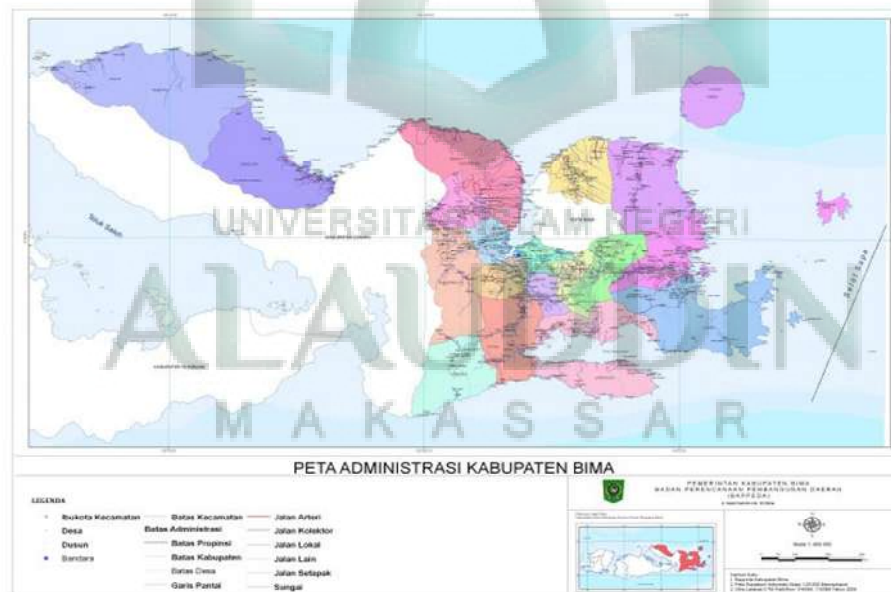


Bima (*mbojo*) adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Bima (*mbojo*) terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Kota Bima (*mbojo*) terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima  
 Selatan : Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima  
 Bara : Teluk Bima  
 Timur : Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima

### Kabupaten Bima (*Mbojo*)



Kabupaten Bima (*mbojo*) adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha. Kabupaten Bima (*mbojo*) merupakan

salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (*mbojo*) (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima (*mbojo*) berada pada posisi 117°40"-119°10" Bujur Timur dan 70°30" Lintang Selatan.

Kabupaten Bima (*mbojo*) memiliki 18 kecamatan, yakni :

- 1) Kecamatan Ambalawi
- 2) Kecamatan Belo
- 3) Kecamatan Bolo
- 4) Kecamatan Donggo
- 5) Kecamatan Lambitu
- 6) Kecamatan Lambu
- 7) Kecamatan Langgudu
- 8) Kecamatan Madapangga
- 9) Kecamatan Monta
- 10) Kecamatan Palibelo
- 11) Kecamatan Parado
- 12) Kecamatan Sanggar
- 13) Kecamatan Sape
- 14) Kecamatan Soromandi
- 15) Kecamatan Tambora
- 16) Kecamatan Wawo
- 17) Kecamatan Wera
- 18) Kecamatan Woha



#### 4. Struktur Organisasi



Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2018

#### B. Proses Penyelesaian Perkara terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama pada Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

##### 1. Putusan Pengadilan Agama Bima mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama Perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat Lembaga Peradilan di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan

peradilan khusus, karena menangani perkara-perkara tertentu. Peradilan Agama juga merupakan peradilan bagi orang yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu selesai. Dengan demikian harta apapun yang diperoleh mulai dari saat dilaksanakannya akad nikah sampai terjadinya perpisahan, baik perpisahan hidup (perceraian) maupun perpisahan mati, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing namun ketika penyelesaian mengenai sengketa harta bersama berlangsung timbul kekhawatiran dari salah satu pihak yang berseengketa akan dialihkannya dan dijual objek sengketa kepada pihak lain, berdasar pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf c serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf b pengadilan agama berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama antara suami isteri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Bima maka diperoleh data mengenai perkara pembagian harta bersama

---

<sup>1</sup>Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 129.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 299.

yang di dalamnya terdapat sita jaminan dari putusan pengadilan agama Bima, sesuai dari keterangan-keterangan dari pejabat jurusita, panitera pengganti dan hakim yang diwawancarai. Berikut ini adalah salah satu perkara yang diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan perkara perselisihan atas harta bersama yang terdapat sita jaminan tertuang dalam putusan perkara Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. antara Misbah binti Ismail Umur 39 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di RT. 05/RW. 03, Desa parangina kecamatan sape, Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2017 yang telah diregister pada kepaniteraan pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 101/2017/PA/BM, TERTANGGAL 8 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Arifuddin, S.H., Advokat/pengacara pada 'LBH YUSTISIO' beralamat di jalan lintas karumbu Rt.01 Lingkungan Udayana Cenggu Bima, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan Kaharuddin bin Abdul Hamid Umur 43 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama islam, WNI, bertempat tinggal di Dusun wera, RT.016/RW 007 Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, kabupaten Bima yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dengan didampingi kuasanya dan tergugat datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Mulyadi S,Ag. Berdasarkan penetapan nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Juni 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Juni 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Penggugat/kuasanya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama Bima dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan perkara pengadilan Agama Bima pada Register

Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm terhadap tergugat, dan diketahui mereka menikah pada tanggal 19 Juli 1992 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor No. 554/59/XI/2009 tanggal 25 November 2009 yang dikeluarkan oleh anor rusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bima dengan dikeluarkannya akta cerai Nomor. 0541/AC/2017/PA.BM.

Selama berlangsungnya pernikahan bahwa keduanya antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. HILDAYATI, perempuan, Umur 24 TAHUN, 2. DAHLIA, perempuan, umur 17 tahun, 3. RAHMA, perempuan, Umur 3 Tahun.

Selama perkawinan keduanya telah menghasilkan harta bersama dan juga yang disebut dalam gugatannya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit bangunan Rumah toko sebagai tempat tinggal dan tempat Usaha Dagang. Yang diperkirakan seharga + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan luas 6,5 x 11 M2 yang terletak di Dusun Wera RT.016/RW.007 Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : irfan/Nifasih

Sebelah Selatan : Nafisah

Sebelah Barat : M. Said

- b. Satu unit bangunan rumah digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang Dagangan yang diperkirakan seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), seluas 14 x 12 M2 yang terletak di Dusun Tambe RT.018/RW.008 Desa Rai Oi, kecamatan Sape Kabupaten Bima, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Mujnah

Sebelah Timur : Ridwan

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah barat : Fharudin

- c. Sebidang tanah seluas 35 are, terletak di so sanggaria batasan Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan batas-batasnya didapat dengan cara pegang Gadai sebesar Rp. 30.000.000,- dari pemiliknya a.n ALIHA M. YUNUS ;
  - d. Barang-barang Dagang utama (Kaca, bahan Meubel dan furnitur); serta perlengkapan Rumah Tangga senilai Rp. 386.360.000,- (tigah ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
1. Bahwa, adapun harta bersama (gono gini) sebagaimana yang tersebut pada point 7 huruf d, diatas milik penggugat dengan tergugat , dengan perincian sebagaimana yang tertera sebagai berikut:

**a. Rincian Harta Bersama yang terdapat di Rumah Toko yang terletak di Dusun Wera RT 016/RW 007 Desa Rai Oi, kecamatan Sape, kabupaten Bima:**

1. Kaca ukuran 5 ml dengan harga satuan Rp. 1.900.000 x 7 peti sejumlah 12.000.000.-
2. Kaca cermin dengan harga satuan Rp. 450.000 x 1 peti sejumlah Rp. 6.000.000,-
3. Paku (semua ukiran) dengan harga satuan Rp. 450.000 x 40 set sejumlah Rp. 18.000.000,-
4. Kayu his liasan dengan harga satuan Rp. 500.000 x 250 kat sejumlah Rp. 125.000.000,-

5. Triplek dengan harga satuan Rp. 50.000 x 150 lembar sejumlah Rp. 7.500.000,-
6. Cat tembok merk ARIES dengan harga satuan Rp. 50.000 x 50 dus peti sejumlah Rp. 2.500.000,-
7. Cat kuplus dengan harga satuan Rp. 80.000 x 6 dus sejumlah Rp. 450.000,-
8. Payung dengan harga satuan Rp. 30.000 x 50 lusin sejumlah Rp. 1.500.000,-
9. Alat-alat medis (ensen, kunci, tarikan dll) sejumlah Rp. 30.000.000,-
10. Kayu ukuran dengan harga satuan Rp. 150.000 x 10 ikat sejumlah Rp. 1.500.000,-
11. Alat mebel (mesin) dengan harga satuan Rp. 600.000 x 3 unit sejumlah Rp. 1.800.000,-
12. Plastik dengan harga Rp. 250.000 x 5 gulung sejumlah Rp. 250.000,-
13. Tarikan pintu dengan harga Rp. 350.000 x 100 lusin sejumlah Rp. 35.000.000,-
14. Lemari dengan harga satuan Rp. 800.000 x 65 buah sejumlah 52.000.000,-
15. TV dengan harga satuan Rp. 2.800.000 x 1 unit sejumlah 2.800.000,-
16. Springbed dengan harga satuan Rp. 2.500.000 x 1 unit sejumlah Rp. 2.500.000,-
17. Gelas dengan harga Rp. 80.000 x 3 lusin sejumlah Rp. 240.000,-

18. Kipas angin dengan harga satuan Rp.350.000 x 5 unit sejumlah  
Rp.1.750.000,-

19. Kompor merk Hock dengan harga satuan Rp.270.000 x 1 unit  
sejumlah Rp.270.000,-

Dengan total keseluruhan sejumlah Rp.302.660.000,- (*tiga ratus  
dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*)

**b. Rincian harta bersama yang terletak di Rumah toko yang  
terletak di Dusun Tambe RT.018/RW.008 Desa Rai Oi,  
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima :**

1. Kaca cermin dengan harga satuan Rp.6.000.000,- x 1 peti sejumlah  
Rp.6.000.000,-
2. Kaca (ukuran 2 ml) dengan harga Rp.3.000.000,- x 8 peti sejumlah  
Rp.24.000.000,-
3. Kaca ukuran 3 ml dengan harga Rp.2.500.000,- x 4 peti sejumlah  
Rp.10.000.000,-
4. Kayu dengan harga satuan Rp.50.000,- x 250 balok sejumlah Rp.  
12.000.000,-
5. Lemari (ada isinya) dengan harga 8 unit sejumlah Rp.3000.000,-
6. Kursi 2 (Dua) set sejumlah Rp.5.000.000,-
7. Dipan + kasur 3 (tiga) buah sejumlah Rp.3.000.000,-
8. Dipan dengan harga satuan Rp.500.000,- x 7 buah sejumlah  
Rp.3.500.000,-
9. Meja makan harga satuan Rp.2.500.000,- x 1 unit sejumlah  
Rp.1.700.000,-

10. Kulkas dengan harga satuan Rp.1.700.000,- x 1 unit sejumlah Rp.1.700.000,-
11. Mesin cuci dengan harga satuan Rp.2.000.000,- x 1 unit sejumlah Rp.2.000.000,-
12. TV dengan harga Rp.2.500.000,- x 1 sejumlah Rp.2.500.000,-
13. Rak + barang pecah belah dengan harga Rp.1.000.000,-
14. Padi 30 karung harga satuan Rp.250.000,- x 30 karung sejumlah Rp.7.500.000,-

Dengan total keseluruhan sejumlah RP.83.700.000,- (*delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Bahwa, oleh karena penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian dan diantara penggugat dengan tergugat , tidak terjadi suatu perjanjian tertentu dalam menyelesaikan harta bersama, maka menurut Hukum Islam pembagian haersama yang terhitung sebesar Rp. 666.360.000,- (*enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dibagi menjadi dua bagian yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 93 (2) Kompilasi Hukumk Islam jo pasal 157 Kompilasi Hukum Islam – Inpres No. 1 Tahun 1991 ;

Bahwa, sangat dikhawatirkan tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian atau seluruh harta bersama kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum penggugat, untuk itu penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut sebelum ada putusan akhir.

Kemudian penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga serta menetapkan harta bersama yang telah disebutkan di atas serta



menyatakan dan menetapkan bahwa penggugat sah dan berhak 50% (lima puluh persen) atas harta bersama (*Goni Gini*).

Setelah gugatan dibacakan penggugat tersebut diatas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Kemudian atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara Resmi dan Patut;

Kemudian atas permohonan penggugat yang meminta agar diatas objek sengketa diletakan sita jaminan karena permohonan tersebut tepat dan beralasan maka majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya sita jaminan atas objek tersebut pada tanggal 8 September 2017.

Setelah dilakukannya penyitaan, pada pemeriksaan siding selanjutnya yaitu acara pembuktian. Pada tahap pembuktian, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lain secara bergantian oleh hakim.

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian, bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>3</sup>

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52060664107871438, tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan di nazezellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (cet.III; Jakarta : Sinar Grafika, 2005),h.299.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206063112100037, tanggal 28 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0541/AC/2017/PA.Bm, tanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi pernyataan Nomor 296/Kua.19.06/PW.01/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 0142/23.01/OK/015/2016, tanggal 03 Maret, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perizinan Terpadu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. FOTOKOPI SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK MILIK Nomor 738, tanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, kabupaten bima, Bukti surat tersebut telah materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi kuitansi Gadai Tanah seharga Rp. 30.000.000,- luas tanah 35 ha., tanggal 20 Mei 2015, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi faktur penjualan Mitra Aluminium, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Toko Mitra, kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Faktur, tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh CV. Surya Jaya Abadi , Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Faktur, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Faktur Invoice, tanggal 01 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Faktur invoice, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Faktur invoice, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Faktur invoice, tanggal 11 Oktober 2016 Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Faktur invoice, tanggal 16 Nopember 2016 Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Faktur invoice, tanggal 07 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Nota, tanggal 21 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Nota, tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh UD.S. Arifin, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Nota, tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh UD.S. Arifin, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Nota, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh UD.S. Arifin, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Nota, tanggal 13 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Nota, tanggal 17 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Nota, tanggal 20 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Nota, tanggal 15 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Nota A. No. 002061, tanggal 7 september 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Nota A. No. 000570, tanggal 12 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Nota A. No. 004155, tanggal 15 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Nota A. No. 004962, tanggal 13 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Nota A. No. 009029 , tanggal 07 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Nota A. No. KSR104, tanggal 17 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.30 dan diparaf.

31. Fotokopi Nota fuji/02/4, tanggal 28 Nopember 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Nota, tanggal 15 September 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Nota, tanggal 10 April 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Nota, tanggal 17 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat. Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Nota, tanggal 12 pebruari 2016, Bukti surat tersebut telah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada penggugat.  
Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.35;

Selain surat-surat Bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi dihadapan sidang yang masing-masing bernama :

**Ahmad bin H. Mukmin**, umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 016/ 03 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. saksi mengetahui selama menikah penggugat dan tergugat telah memperoleh harta berupa:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah dan pekarangannya di Rt. 014 Rw. 08 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan luas 14 x 11 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah utara dengan rumah mujnah/samu;
    - sebelah selatan dengan Gang
    - sebelah Barat dengan rumah fahrudin
    - sebelah Timur dengan rumah Ridwan.
  2. 1 (satu) unit bangunan Ruko dan pekarangannya di Rt.016 Rw.08 Desa Rai Oi kecamatan sape kabupaten Bima dengan luas 6x 11 M2 dengan batas-batas sebagai Berikut :
    - sebelah utara dengan jalan Raya
    - sebelah selatan dengan Nafisah
    - sebelah Barat dengan rumah M.Said
    - sebelah Timur dengan rumah Irfan
- b. tanah pegang gadai watasan desa Rasa Bou kecamatan Sape kabupaten Bima, adapun batas-batas dan luasnya tidak tahu dengan pasti ;



- bahwa, Toko tersebut masih dipakai Tergugat untuk berjualan di Toko tersebut;
  - bahwa, toko tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.
  - bahwa, mereka membeli dari saksi dengan harga Rp. 4.500.00,00.
  - bahwa, saksi tidak tahu penggugat dan tergugat mempunyai motor
  - bahwa, ruko tersebut tidak ada ijin bangunan dan yang menguasai adalah tergugat;
- 
- **Nurjanah binti Husen**, umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 012/ 06 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Saksi II; Benar bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bercerai dan memiliki anak 3 orang;
  - Benar bahwa saksi mengetahui harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan tergugat berupa 2 unit rumah dan pekarangannya yakni satu unit dijadikan tempat usaha yang terletak di dusun Wera dan 1 unit rumah lagi dijadikan dijadikan tempat tinggal;
  - Benar bahwa ke 2 (dua) unit bangunan Rumah/toko tersebut terletak di Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima yang luas dan batas-batasnya sesuai surat Gugatan Penggugat;
  - Benar bahwa harta bersama (gono-gini) berupa 1 unit rumah dan pekarangannya seluas 14 x 12 M seingat saksi dibangun bersama oleh penggugat dengan tergugat keduanya memiliki 1 orang anak;

- Benar bahwa tanah pekarangan dimiliki penggugat dan tergugat di Dusun Tambe dibeli oleh keduanya dari saksi AHMAD (saksi 1) dan saksi tidak mengetahui persis harganya;
- Benar bahwa harta bersama (gono-gini) 2 unit rumah/rumah toko beserta isinya saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat.
- **Aliha bin M.Yunus**, umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt. 012/06 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Saksi III. Kemudian saksi memberikan keterangan Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah bercerai an telah memiliki anak-anak 3 orang;
- Bahwa saksi menggadaikan tanah sawah kepada penggugat yaitu tanah sawah seluas + 35 are, yang terletak di So Sanggaria, watasan Desa Rasabou sekarang Desa Oi Maci, kecamatan Sape, kabupaten Bima dengan batas-batasnya sebelah Utara Tanah Sawah Tajuddin, Sebelah Timur Tanah Sawah Muhtar, sebelah selatan Tanah sawah Mustamin, sebelah Barat Tanah Sawah H.Samsuddin.
- Bahwa yang menggadaikan sawah dimaksud adalah saksi sendiri seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sekitar tahun 2016.

Selanjutnya tergugat pada sidang pemeriksaan pembuktian, tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi dan tergugat tidak pula mengajukan jawaban.

Setelah melalui tahap pembuktian dan dari fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan, maka sampailah pada tahap kesimpulan dan penutup. Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut:

**Tentang terbuktinya Dalil Gugatan Penggugat:**

1. Bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi penggugat, terdapat persesuaian antara keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III mengenai obyek yang menjadi harta bersama (Gono-Gini) di, miliki oleh penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri;
2. Bahwa, begitu pula ditemukan fakta berdasarkan pelaksanaan sita jaminan (marital Beslaag) hari jum'at tanggal 8 september 2017 yang dilakukan oleh JURUSITA maupun hasil pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim hari jumat tanggal 4 september 2017, ditemukan fakta tentang kondisi dan keberadaan obyek harta bersama sesuai dengan surat gugatan penggugat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (Marital Beslaag) hari jum'at tanggal 8 september 2017 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Bima;
3. Bahwa, dalil-dalil gugatan penggugat telah mampu dibuktikan, baik dengan bukti-bukti surat, maupun bukti keterangan saksi-saksi; bersesuaian pula dengan fakta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas Harta Bersama Oby PERNAH HADIR DI MUKA SIDANG meski telah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan perundang-perundangan, selama pemeriksaan pokok perkara aquo. Oleh karena demikian maka penggugat mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menurut Hukum;
4. Bahwa, selama pokok perkara aquo diperiksa dimuka sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pihak Tergugat TIDAK MENGAJUKAN BANTAHAN/JAWABAN menurut tata cara yang ditentukan sesuai Hukum; Dengan demikian maka penggugat

menganggap Tergugat mengakui kebenaran dalil-dali Gugatan Penggugat. Pengakuan-pengakuan mana kedudukannya dalam perkara perdata merupakan bukti yang lengkap/ sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBG, pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUHPerdata;

Pertimbangan atau yang disebut dengan *Considerans* merupakan dasar putusan apa yang dimuat dalam bagian dari pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pengadilan Agama Bima berwenang menerima, mmeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat di depan sidang, bahkan penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi

sesuai ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2016 dengan mediator Mulyadi, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak lagi datang dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap *reveltel* (yaitu tidak mengetahui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat) dan sepenuhnya diserahkan pada penilaian majelis hakim dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan tergugat telah memiliki Harta Bersama yang terurai sebagaimana *a-quo*;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasar pengakuan tergugat sebagaimana bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus sesuai putusan pengadilan Agama Bima Nomor. 352 Pdt.G/2017/PA.BM, TANGGAL 19 April 2017, dan sesuai akta cerai Nomor: 0541/AC/2017/PA.BM, TANGGAL 9 Mei 2017 (Bukti P-3), maka secara *yuridis formil* telah terbukti kebenarannya bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang sah. Sehingga dengan demikian penggugat mempunyai kapasitas untuk menjadi subyek hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (*gono-gini*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan penggugat yang meminta agar diatas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) dengan alasan adanya kekhawatiran tergugat akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan mengalihkan sebagian atau seluruh harta bersama kepada pihak lain, maka untuk

menjamin kepentingan hak-hak dan kepentingan hukum penggugat dan guna mencegah hal-hal yang merugikan hak dan kepentingan hukum penggugat, karena sertifikat atas obyek sengketa tersebut atas nama tergugat dan dikuasai sepenuhnya oleh tergugat, maka majelis hakim menilai permohonan tersebut tepat dan beralasan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan sehingga sita jaminan atas obyek tersebut dilakukan pada tanggal 18 september 2017 dengan penetapan Nomor : 615/Pdt.G/2017/PA.BM, pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa karena penyitaan (*Conservatoir Beslaag*) itu telah dilakukan dengan cara-cara yang diatur dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan Hukum acara yang berlaku maka majelis hakim dapat menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang di maksud HARTA BERSAMA dalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Serta HARTA BAWAAN adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan, dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi JANDA atau DUDA cerai hidup masing-masing berhak setengah dari HARTA BERSAMA tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut bukti tertulis yang di tandai P.1 P.2 P.3 oleh karena bukti tersebut bukti *autentik*, secara *formal* dan *prosedural* telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, dimana bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah di cocokkan dengan aslinya secara supstansial juga

relefan dengan dalil-dalil penggugat maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tentang bukti P.5 P.6 P.7 oleh karena telah memenuhi syarat *formal* maupun *prosedural* yakni telah dibubuhi materai dan di coccokkan dengan aslinya dan *relevan* dengan dalil penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini.

Menimbang, terhadap bukti P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 sampai P.16, telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup secara formal maupun materil dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis serta dapat diterima sebagai petunjuk bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha dagang di Toko/Ruko yang berada di Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang terhadap bukti P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.22 sampai P.24 , telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup secara *formal* maupun *materil* dan *prosedural* telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis serta dapat diterima sebagai petunjuk bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha dagang di Toko/Ruko yang berada di Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang terhadap bukti P.25 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 , telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup secara *formal* maupun *materil* dan *prosedural* telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis serta dapat diterima sebagai petunjuk bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha dagang di Toko/Ruko yang berada di Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang, terhadap bukti P.31 P.32 P.33 P.34 P.35. telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup bukti-bukti tersebut adalah copy Nota Fuji pembelian barang-barang yang diperjual belikan (isi toko) secara *formal* maupun *materil* dan *prosedural* telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis serta dapat diterima sebagai petunjuk bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha dagang di toko/ruko yang berada di Desa rai oi kecamatan sape kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti tertulis mulai dari P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 , sampai dengan P.35. adalah mengenai nota-nota barang alias isi toko yang masih berjalan yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut ada yang belum terjual sehingga masih ada di toko tersebut dan ada yang sudah tidak ada lagi di lokasi (tempat) toko. Oleh karena itu majelis hakim dapat menilai barang-barang tersebut harus di terima sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut diatas penggugat mengajukan alat bukti yang lainnya yaitu 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah dan pekarangannya yang terletak di Rt.014 Rw. 08 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan luas 14 x 11 M dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan rumah Mujnah/samu
  - Sebelah selatan dengan Gang
  - Sebelah Barat dengan rumah fahrudin
  - Sebelah Timur dengan Rumah Ridwan
2. 1 (satu) unit bangunan ruko dan pekarangannya yang terletak di Rt. 016 Rw.08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan luas 6 x 11 M dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan jalan Raya;
  - Sebelah selatan dengan Nafisah
  - Sebelah barat dengan rumah M.said
  - Sebelah Timur dengan Irfan;



3. 3 (tiga) petak tanah pegang gadai watasen Desa Rasabou kecamatan Sape Kabupaten Bima , seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas untuk menambah keyakinan dan pembuktian di tempat maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 22 September 2017 di Desa Rai Oi kecamatan Sape kabupaten Bima yang dalam pemeriksaan tersebut serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan terungkap fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko/Ruko dan tanah pekarangan yang berada di wilayah Rt. 16 Rw. 07 Desa Rai Oi , kecamatan Sape kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan jalan Raya ;
  - Sebelah selatan dengan Nafisah ;
  - Sebelah Timur dengan Irfan ;
  - Sebelah barat dengan rumah M.said ;
2. Isi Ruko/Toko di Rt.16 Rw.07 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima tersebut diatas sebagai berikut :
  - 1) Paku 2 (dua) dos ;
  - 2) Kayu lis hiasan 11 ikat ;
  - 3) Cat tembok aries 2 (dua) dos
  - 4) Cat kuplo 2 (dua) ember/kaleng ;
  - 5) Alat-alat mebel yakni ense 24 buah ;
  - 6) Lemari rak 4 buah ;
  - 7) Tv 32 inci merk sharp ;
  - 8) Gelas 4 (empat) lusin;
  - 9) Plastik 25 biji

- 10) Payung 13 buah
  - 11) Triplek 2 lembar
  - 12) Kaca ukuran 5 mil 3 lembar
  - 13) Kipas angin 2 (dua) buah terdiri dari 1 (satu) kipas angin dinding merk mitsunichi dan 1 (satu) kipas angin berdiri merk cosmos;
3. Satu unit rumah di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan
  4. seluas 14x12 M yang terletak di Dusun Tambe Rt 18 Rw 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Rumah Mujnah ;
    - Sebelah selatan dengan Gang ;
    - Sebelah Timur dengan Rumah Ridwan ;
    - Sebelah Barat dengan Fahrudin ;
  5. Perincian isi rumah di RT 18 RW 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai Berikut :
    - 1) Kayu sonokling sebanyak 30 Balok/ ;
    - 2) Lemari hiasan, sudut dan bofet, jumlahnya 8 unit
    - 3) Kursi sudut 2 set ;
    - 4) Difan kasur 2 set ;
    - 5) 1 (satu) buah meja makan ;
    - 6) 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Fujitec ;
    - 7) 1 (satu) unit merk TV merk Digitec ukuran 21 inci ;
    - 8) Rak barang pecah belah ;
    - 9) 1 (satu) buah mesin cuci merk sanyo ;
  6. Uang pegang gadai tanah sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) tanah terletak di watasan rasabou kecamatan Sape kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan ditambah lagi dengan keyakinan majelis hakim pada saat sidang setempat (pemeriksaan lokasi) maka Majelis hakim dapat menilai alat-alat bukti itu dapat mendukung dalil gugatan penggugat, sedangkan tergugat tidak memberikan bantahan atas dalil gugatan penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat telah terbukti, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa harta bersama (gono-gini) antara penggugat dan ytergugat adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko/Ruko dan tanah pekarangan yang berada di wilayah Rt. 16 Rw. 07 Desa Rai Oi , kecamatan Sape kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara dengan jalan Raya ;
  - Sebelah selatan dengan Nafisah ;
  - Sebelah Timur dengan Irfan ;
  - Sebelah barat dengan rumah M.said ;
2. Isi Ruko/Toko di Rt.16 Rw.07 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima tersebut diatas sebagai berikut :
  - 1) Paku 2 (dua) dos ;
  - 2) Kayu lis hiasan 11 ikat ;
  - 3) Cat tembok aries 2 (dua) dos
  - 4) Cat kuplo 2 (dua) ember/kaleng ;
  - 5) Alat-alat mebel yakni ense 24 buah ;
  - 6) Lemari rak 4 buah ;
  - 7) Tv 32 inci merk sharp ;

- 8) Gelas 4 (empat) lusin;
  - 9) Plastik 25 biji
  - 10) Payung 13 buah
  - 11) Triplek 2 lembar
  - 12) Kaca ukuran 5 mil 3 lembar
  - 13) Kipas angin 2 (dua) buah terdiri dari 1 (satu) kipas angin dinding merk mitsunichi dan 1 (satu) kipas angin berdiri merk cosmos;
3. Satu unit rumah di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan seluas 14x12 M yang terletak di Dusun Tambe Rt 18 Rw 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Rumah Mujnah ;
  - Sebelah selatan dengan Gang ;
  - Sebelah Timur dengan Rumah Ridwan ;
  - Sebelah Barat dengan Fahrudin ;
4. Perincian isi rumah di RT 18 RW 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai Berikut :
- 1) Kayu sonokling sebanyak 30 Balok/ ;
  - 2) Lemari hiasan, sudut dan bofet, jumlahnya 8 unit
  - 3) Kursi sudut 2 set ;
  - 4) Difan kasur 2 set ;
  - 5) 1 (satu) buah meja makan ;
  - 6) 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Fujitec ;
  - 7) 1 (satu) unit merk TV merk Digitec ukuran 21 inci ;
  - 8) Rak barang pecah belah ;
  - 9) 1 (satu) buah mesin cuci merk sanyo ;

5. Uang pegang gadai tanah sejumlah Rp.30,000,000 (tiga puluh juta Rupiah) tanah terletak di watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan HARTA BERSAMA sebagaimana *a-quo* berada dalam kekuasaan tergugat maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta tersebut kepada penggugat. Dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dibagi in natura maka harus dijual melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada penggugat dan setengah bagian kepada tergugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) bahwa oleh karena gugatan tidak didasarkan kepada bukti authentic atau setidaknya tulisan tangan (*handscharift*) yang kebenaran isi dan tanda tangannya tidak dibantah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut harus ditolak sesuai ketentuan pasal 180 HIR dan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat sepanjang menyangkut harta bersama ada yang di kabulkan dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' / hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim mengadili:

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan Hukum Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 08 September 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama penggugat dan tergugat adalah :
  - 3.3.1. 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko/Ruko dan tanah pekarangan yang berada di wilayah Rt. 16 Rw. 07 Desa Rai Oi kecamatan Sape kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara dengan jalan Raya ;
    - Sebelah selatan dengan Nafisah ;
    - Sebelah Timur dengan Irfan ;
    - Sebelah barat dengan rumah M.said ;
  - 3.3.2. Isi Ruko/Toko di Rt.16 Rw.07 Desa Rai Oi kecamatan Sape Kabupaten Bima tersebut diatas sebagai berikut :
    - 1) Paku 2 (dua) dos ;
    - 2) Kayu lis hiasan 11 ikat ;
    - 3) Cat tembok aries 2 (dua) dos
    - 4) Cat kuplo 2 (dua) ember/kaleng ;
    - 5) Alat-alat mebel yakni ense 24 buah ;
    - 6) Lemari rak 4 buah ;

- 7) Tv 32 inci merk sharp ;
- 8) Gelas 4 (empat) lusin;
- 9) Plastik 25 biji
- 10) Payung 13 buah
- 11) Triplek 2 lembar
- 12) Kaca ukuran 5 mil 3 lembar
- 13) Kipas angin 2 (dua) buah terdiri dari 1 (satu) kipas angin dinding merk mitsunichi dan 1 (satu) kipas angin berdiri merk cosmos;

3.3.3. Satu unit rumah di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan seluas 14x12 M yang terletak di Dusun Tambe Rt 18 Rw 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Mujnah ;
- Sebelah selatan dengan Gang ;
- Sebelah Timur dengan Rumah Ridwan ;
- Sebelah Barat dengan Fahrudin ;

3.3.4. Perincian isi rumah di RT 18 RW 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai Berikut :

- 1) Kayu sonokling sebanyak 30 Balok/ ;
- 2) Lemari hiasan, sudut dan bofet, jumlahnya 8 unit
- 3) Kursi sudut 2 set ;
- 4) Difan kasur 2 set ;
- 5) 1 (satu) buah meja makan ;
- 6) 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Fujitec ;
- 7) 1 (satu) unit merk TV merk Digitec ukuran 21 inci ;

8) Rak barang pecah belah ;

9) 1 (satu) buah mesin cuci merk sanyo ;

3.3.5. Uang pegang gadai tanah sejumlah Rp.30,000,000 (tiga puluh juta Rupiah) tanah terletak di watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 (tiga) di atas adalah milik penggugat , dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut diatas sesuai dengan angka 4 (empat) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.266,000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.H. Muhidin,MH.** Selaku Ketua Majelis, **Drs. Latif** dan **Lutfi Muslih, S.Ag., MA.** Masing-masing selaku Hakim Anggota serta di dampingi oleh Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat;



## **2. Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama pada Putusan Perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm di Pengadilan Agama Bima**

Setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama di Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah. Dalam pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa “apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian pasal di atas, jadi sudah jelas sekarang bahwa jika terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya adalah orang yang beragama Islam, maka yang berhak untuk memutus, mengadili, dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Bima khususnya, dapat dijatuhkan terhadap sengketa apa saja yang berkaitan dengan hak milik dan terdapatnya kekhawatiran atau adanya *indikasi* bahwa harta bersama tersebut akan dipindahtangankan dari pihak penggugat oleh pihak tergugat.<sup>4</sup> Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Bima dilaksanakan berdasarkan pada

---

<sup>4</sup> Drs. Muhidin, M.H., selaku Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bima, wawancara tanggal 13 Juli 2018.

penetapan majelis hakim dengan putusan sela, berdasarkan permohonan dan alasan-alasan penggugat dalam gugatannya dan perlu dilakukakannya sita jaminan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) di Pengadilan Agama Bima pada dasarnya sama dengan pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) pada penyitaan biasa, yaitu harus diajukan kepada ketua pengadilan Agama Bima selaku pimpinan *eksekutor* dalam perkara perdata. Jadi pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) harus terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga sebelum adanya putusan akhir.

Selanjutnya dalam melaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Bima bahwa prosedur pelaksanaan sita jaminan sebagai berikut:

1. Berdasar pada penetapan majelis hakim pengadilan yang dituangkan dalam surat penetapan, setelah ada putusan sela dari pengadilan dan berisikan perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita atau juru sita pengganti yang dibantu oleh dua orang saksi yang cakap akan penyitaan, dapat dipercaya, dan berumur paling rendah 21 tahun.
3. Penyitaan dilakukan di mana barang-barang tersebut terletak dengan memberitahukan kepada tergugat untuk hadir dalam acara penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan yang berisi mengenai;
  - a. Tanggal dan nomor surat penetapan
  - b. Jam, tanggal, hari, bulan dan tahun penyitaan

---

<sup>5</sup>Drs. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara tanggal 12 Juli 2018.

- c. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi
  - d. Rincian satu persatu barang yang disita
  - e. Menjelaskan kepada siapa barang yang disita akan disimpan
  - f. Ditanda tangani oleh juru sita dan saksi saksi
4. Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan dan memutus bahwa sita jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga.

Terhadap sita jaminan atas benda-benda yang tidak bergerak maka pendaftarannya dilakukan di kantor agraria atau kantor Pertanahan/ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan didaftarkannya objek sengketa tersebut maka tidak bisa dialihahkan kepada pihak ketiga, baik penggugat atau tergugat. Pengalihah ini dapat berupa jual beli, hibah, dan wasiat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan sita jaminan dalam putusan perkara Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm dilakukan pada tanggal 8 September 2017, setelah adanya penetapan dari majelis hakim pada tanggal 8 Agustus 2017 berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sulaiman selaku jurusita pengganti mengatakan bahwa: sita jaminan dilaksanakan di Desa rai oi kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang pada saat itu hanya dihadiri oleh penggugat/kuasanya (Misbah) sedangkan tergugat (Kaharudin) tidak hadir karena sedang dalam status tahanan, serta turut hadir staf desa beserta keluarga dari para pihak dan berkumpul di kantor Desa kemudian Diberikan terlebih dahulu penjelasan maksud dan tujuan kedatanganya, setelah itu bersama kepala desa jurusita turun mengecek obyek-obyek yang ada dalam surat gugatan tersebut ada atau tidak. Setelah di lakukan sita ternyata ada beberapa obyek sita yang telah dipindahtangankan oleh tergugat. Tetapi jurusita hanya melakukan penyitaan terhadap obyek sita yang ada ditempat karena obyek sita yang telah dipindahtangankan oleh tergugat bukan menjadi

---

<sup>6</sup>Drs. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara tanggal 12 Juli 2018.

wewenang jurusita untuk dilakukan sita. Dari hal tersebut telah menunjukkan bahwa ada itikad tidak baik dari pihak tergugat. Setelah itu juru sita pengganti membuat berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh juru sita pengganti, saksi-saksi, pihak tergugat, staf desa, yang isinya tadi supaya obyek yang diletakan sita itu tidak boleh dipindahtangankan atau dijual belikan kepada pihak lain sebelum ada penetapan dari ketua majelis.<sup>7</sup>

Setelah penyitaan itu telah dilakukan dengan cara-cara yang diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum acara yang berlaku maka majelis hakim dapat menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

***C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama Putusan Perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm***

Sebagaimana yang disebutkan pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa alasan penyitaan atau sita jaminan yaitu karena adanya kekhawatiran dari pihak penggugat (Misbah) dialihkannya Harta Bersama oleh tergugat (Kaharudin) kepada orang lain, tanpa sepengetahuan penggugat (Misbah). Hal demikian, dalam hukum Islam tidak disebutkan dengan Rinci, namun dapat dilihat berdasarkan pada alasannya yaitu mengenai harta milik yang dikuasai secara batil. Dalam tinjauan Hukum Islam mengenai suatu kemaslahatan yang bisa dijadikan landasan hukum terhadap perkara atau masalah yang belum ada nas hukumnya, yaitu *masalah mursalah* disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.<sup>8</sup>

Definisi lain dari *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada nas *juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya

---

<sup>7</sup> Sulaiman, S.H., Selaku Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima, *Wawancara*, (Bima, 18 juli 2018).

<sup>8</sup> Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CET.I; Bandung : Gema Risalah), h.142

serta tidak ada *nas ijma'* yang mendukungnya. Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah yang melalui cara *istiqro'* ( *induksi* dari sejumlah *nas*).<sup>9</sup>

Perampasan terhadap barang milik orang lain dapat disebut dengan *gosob* yaitu: pengambilan alih seseorang terhadap hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan, penindasan, dan hukumnya adalah haram.<sup>10</sup> Sedangkan Islam melarang untuk menguasai harta orang lain dengan cara batil. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan Harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>11</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari sa'id bin jubair: bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Imriil Qais bin'Abis dan 'Abdan bin Asyma' Al-Hadlrami Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan Hakim. Ayat ini sebagaimana peringatan kepada orang-orang yang merampas Hak orang lain dengan jalan bathil.<sup>12</sup>

Terkait dengan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) dalam hal sengketa harta bersama terlebih dahulu akan dibahas hakikat *Maslahah mursalah* dalam *maqasid as-syariah* itu sendiri. Karena sebagai *doktrin*, dan sebagai metode dalam merumuskan berbagai teori dan metode *ijtihad* dalam menghadapi kenyataan (peristiwa Hukum) yang selalu berkembang. *Maqasid as-syariah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia ,

<sup>9</sup> Haji Nasrun Harun, *Ushul fiqh*, (Jakarta:Logos,1996), h. 113

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid XIII*, h.76

<sup>11</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.29.

<sup>12</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.30

khususnya umat islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada disekeliling kita.

*Maslahah* bearti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh* , tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syari'at.

Imam Al-gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak hawa nafsu.<sup>13</sup>Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak dan tujuan manusia.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam sengketa harta bersama ada dan dilaksanakan untuk mencapai satu *kemaslahatan* untuk kedua belah pihak terutama penggugat. Ada beberapa macam pembagian *maslahah* menurut ulama *usul fiqh* , diantaranya adalah :

a. *Maslahah ad-daruriyah*

Ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok ummat manusia di dunia dan akhirat yang mencakup lima aspek, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta hak benda. Lima kemaslahatan ini yang dikenal masa'il al-khamsah.

---

<sup>13</sup> Haji Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, h.114

b. *Maslahah al-hajjiyat*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c. *Maslahah al-tahsiniya*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekuasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>14</sup>

kemaslahatan yang berkaitan dengan tema yang dibahas peneliti mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama di pengadilan Agama Bima, menurut peneliti masuk dalam *masalah al hajjiyat*. Karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari harta penggugat, karena sebagian dari harta yang disengatakan dikuasai oleh tergugat adalah hak dari penggugat. Dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari penggugat dalam melangsungkan kehidupannya.

Berdasarkan pengertian di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan, maksudnya dilakukan dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Kemaslahatan yang menjadi tujuan dari pensyariaan hukum ini disebut masalah mursalah dan para ulama mendasarkan pada masalah mursalah di dalam mensyariatkan Hukum. Lantaran mengandung nilai masalah disamping tidak adanya dalil syara' yang menyalahkannya.<sup>15</sup> Oleh karena

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 116-117

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.127.

itu para ulama mengembangkan metode-metode *ijtihad* dengan memperhatikan sisi substansi *nas* untuk menelusuri tujuan di syariatkan nya Hukum dalam bentuk mengidentifikasi *masalah* dari setiap *maqosid al-syariah*.

Tujuan utama Allah SWT mensyariatkan hukum islam adalah untuk memelihara kemaslahatan, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam itu tidak lain adalah kebaikan. Jadi tatanan masyarakat yang dikehendaki , dengan kebaikan serta bersih dari keburukan dan kerusakan.

Inilah diantara alasan ketertarikan penyusun untuk meneliti dan melihat dari sudut Pandang Hukum Islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara sengketa harta bersama, khususnya di Pengadilan Agama Bima kelas IB yang telah penyusun uraikan di atas.

#### ***D. Analisis terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Bersama Putusan Perkara No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm***

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Bima didasarkan pada Penetapan Majelis Hakim, setelah ada putusan sela dari pengadilan dan berisikan perintah kepada jurusita pengganti untuk melaksanakan sita jaminan, kemudian penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pengganti yang dibantu oleh dua orang saksi. Setelah dilakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan. Lalu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bahwa sita jaminan yang telah dilakukan adalah Sah dan Berharga.



Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) dalam perkara atas harta Bersama Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm. dimana penggugat/kuasanya (Misbah) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kaharudin) , dalam gugatan tersebut berisi permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama, dengan alasan adanya kekhawatiran tergugat mengalihkan sebagian atau seluruh harta bersama, dan juga tergugat tidak mau memberikan sebagian Harta Bersama tersebut kepada penggugat. Karena menurut adat yang berlaku di tempat tinggal penggugat di Desa Rai Oi Kec. Sape apabila seorang istri menggugat cerai suami maka si istri tidak diberikan harta Bersama, tapi itu tidak bisa dilakukan karena berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari Harta Bersama tersebut.

Kemudian majelis Hakim mempertimbangkan alasan tersebut maka untuk menjamin hak-hak dan kepentingan Hukum penggugat, karena sertifikat atas obyek sengketa tersebut atas nama Tergugat dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tepat dan beralasan dan Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan untuk dilakukan sita jaminan pada tanggal 8 september 2017, terhadap 1 unit bangunan rumah, toko, serta uang sebesar Rp.30,000,000 yang digunakan untuk membayar gadai tanah seluas 35 are, dan perinciannya sebagaimana yang tercantum dala Berita Acara Sita jaminan (CB) Nomor 615/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Setelah penyitaan (*conservatoir Beslag*) itu dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara yang berlaku maka Majelis Hakim dapat menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa Harta Bersama tersebut Sah dan Berharga.

Pelaksanaan Sita Jaminan (CB) harus terlebih Dahulu dinyatakan Sah dan berharga sebelum adanya putusan Akhir tindakan ini disebut *Van Waarde*

*verklaard* apabila tindakan tersebut tidak dilaksanakan maka sita yang telah dilaksanakan tidak sah, kemudian dirumuskan dalam sidang selanjutnya dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan Nomor : 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita pengadilan Agama Bima kelas IB sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan atau memindahtangankan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan penggugat. Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan Nomor : 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. Telah sesuai berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.
2. Sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB Menurut Hukum Islam merupakan Salah satu dari *Maslahah Mursalah*, yaitu *Maslahah Mursalah al-hajjiyat*. Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari harta penggugat, karena sebagian dari harta yang di sengketakan di kuasai oleh tergugat adalah hak dari

penggugat dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dari penggugat dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-Hajru* berarti membatasi dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian harta, guna untuk menjaga hak dari penggugat. Pembentukan Hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat Luas.

### **B. Implikasi Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa Harta Bersama, para pihak harus mengutamakan pembagian secara musyawarah mufakat dan komunikasi yang baik walaupun telah terjadinya perceraian. lebih memprioritaskan hubungan serta komunikasi yang tetap baik. Dan untuk pembagian harta Bersama selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Apabila telah terjadinya perceraian antara suami isteri, hendaknya Harta bersama yang telah di peroleh selama perkawinan tersebut segera dibagi sebelum Harta Bersama tersebut dikuasai oleh salah satu Pihak, dipindahtangankan/ dialihkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Keempat; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Akbar, Fadli. *Tinjauan Hukum tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata*, Jurnal Penelitian (Fak. Hukum Universitas Tadulako) Jurnal.untad.ac.id.>article> (diakses tanggal 1 Mei 2018)

Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-1; makassar: Alauddin University press, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ketiga belas; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*, cet. Kesatu; Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. Keenam; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

-----, Abdul wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ( Kaidah Ushulul Fiqh)*, Cet. Ketujuh; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kompilasi Hukum Islam.

Lubis, Sulaikin. Marzuki, Wismar 'Ain. Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ke-3; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-8; Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, cet. Ke-1; Jakarta: Prenada Media, 2005.

Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, cet. Pertama; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.

M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariahyah Di Indonesia*, cet. Ke-2; Jakarta: Prenada Media 2005.


-----, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariahyah Di Indonesia*, cet. Ke-6; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Manaf, Abdul. *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Kesatu; Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Cet. XII; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan tanggal 1 1975, LNRI Tahun 1975, No. 12.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. Kelima; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. Ke-48; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. Kelima; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 117, dikutip dalam Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.Pdf , h. 19-20 digilib.uinsby.ac.id (02 Mei 2018).
- Sabiq As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid XIII*
- SEMA No. 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Tertanggal 1 Desember 1975
- Talli, Abd. Halim. *Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri*, cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Yaswirman, *Hukum Keluarga* , cet. Ke-2; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





Nomor : B-~~356~~/SH.01/PP.00.9/06/2018 Samata Gowa,  Juni 2018  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel  
Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Anita Andriani
N I M	: 10100114094
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Semester	: VIII ( Delapan )
Alamat	: Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**"Pelaksanaan Conservatoir Beslag Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas 1.B Perspektif Hukum Islam ( Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/Pa.Bm) "**.

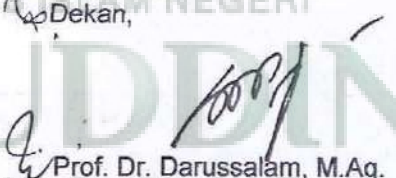
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I  
2. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1.B terhitung mulai tanggal 28 Juni 2018 sampai 28 Juli 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam

Dekan,

  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa (Sebagai Laporan)





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8869/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Nusa Tenggara Barat

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3556/SH-01/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANITA ANDRIANI  
Nomor Pokok : 10100114094  
Program Studi : Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

"PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HERTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1.B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 615/Pdt.G/2017/PS.Bm)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Juli s/d 02 Agustus 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 26 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*







# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Bima, 09 Juli 2018 M  
22 yawal 1439 H

Nomor : 070/121/VI/003/121/2018  
Lampiran : --  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Bima  
di-  
R a b a

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor : 8869/S.01/PTSP/2018. Tanggal 28 Juni 2018. Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANITA ANDRIANI  
NIM : 10100114094  
Program Studi/ Jurusan : Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Bontokape Kec.Bolo

Bermaksud akan mengadakan Penelitian dengan Judul Penelitian "PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HERTA BERSMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1.B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO 615/Pdt.G/2017/PS.Bm)." dari tanggal 09 Juli s/d 09 Agustus 2018 yang berlokasi di SMP PLUS DARUL HUSNA AMBALAWI BIMA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian

Pt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA



EDY TARUNAWAN, SH

Perabina ( IV/a)

Nip. 19651211 200212 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada  
Yang bersangkutan di tempat.





**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 09 Juli 2018

Nomor : 050.7/392/07.1/2018  
Lamp. : -,-  
Perihal : Ijin Penelitian dan Survei

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.B Bima  
di -  
Bima

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/121/VI/003/120/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survey kepada:

Nama : Anita Andriani  
NIM : 10100114094  
Universitas : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas/Jurusan : S1-Syariah dan Hukum  
Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Survei  
Judul : PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1.B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 615/Pdt.G/2017/PS.Bm)  
Lamanya Penelitian : 1(satu) bulan Dari Tanggal 10 Juli s/d 09 Agustus 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kab. Bima  
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Dekan fakultas Svariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar



**SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BIMA**

**NOMOR 0615/Pdt.G/2017/PA.Bm**

**Tanggal 15 Nopember 2017**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

**Gugatan Harta Bersama**

**PENGUGAT : Misbah binti Ismail**

**TERGUGAT : Kaharudin bin Abdul Hamid**



**Salinan**

## **PUTUSAN**

**Nomor 0615/Pdt.G/2017/PA.BM.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MISBAH BINTI ISMAIL**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di RT. 05 / RW. 03, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2017 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 101 /2017/PA.BM, tertanggal 8 Mei 2017 telah memberikan Kuasa kepada Arifuddin, S.H., Advokat/Pengacara pada 'LBH YUSTISIO' beralamat di Jalan Lintas Karumbu Rt.01/RW.01 Lingkungan Udayana Cenggu Bima, Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

**KAHARUDIN bin ABDUL HAMID**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Dusun Wera, RT.016/RW.007 Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan para saksi dihadapan sidang;

- 7) 1 (satu) unit TV merk Digitec ukuran 21 inci;;
- 8) Rak barang pecah belah ;
- 9) 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo ;
5. Uang pegang gadai tanah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanah terletak di watasen Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan HARTA BERSAMA sebagaimana a-quo berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % ( lima puluh persen ) dari harta tersebut kepada Penggugat. Dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dibagi in natura maka harus dijual melalui kantor lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat.;

Menimbang, bahwa tentang gugatan serta merta ( Uitvoerbaar Bij Vorraad ) bahwa oleh karena gugatan tidak di dasarkan kepada bukti autentik atau setidaknya tidaknya surat tulisan tangan (handschariff) yang kebenaran isi dan tanda tangannya tidak dibantah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut harus di tolak sesuai ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat sepanjang menyangkut harta bersama ada yang di kabulkan dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;



2. Menyatakan hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 08 September 2017 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 3.3.1. 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko / Ruko dan tanah pekarangan yang berada di wilayah Rt. 16 Rw. 07 Desa Rai Oi , Kecamatan Sape , Kabupaten Bima. dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Jalan Raya ;
    - Sebelah Selatan dengan Rumah Nafisah ;
    - Sebelah Timur dengan Rumah Irfan ;
    - Sebelah Barat dengan Rumah M. Said ;
  - 3.3.2 Isi Ruko/ Toko di Rt.16 Rw.07 Desa Rai Oi Kecamatan Sape tersebut diatas sebagai berikut :
    - 1) Paku 2 (dua) dos;
    - 2) Kayu lis hiasan 11 ikat;
    - 3) Cat tembok aries 2 (dua) dos
    - 4) Cat kuplo 2 (dua) ember/kaleng;
    - 5) Alat-alat mebel yakni ense 24 buah;
    - 6) Lemari rak 4 buah;
    - 7) Tv 32 inci merk Sharp;
    - 8) Gelas 4 (empat) lusin;
    - 9) .Plastik 25 biji
    - 10),Payung 13 buah
    - 11)Triplek 2 Lembar
    - 12)Kaca Ukuran 5 mil 3 lembar;
    - 13)Kipas angin 2 (dua) buah terdiri dari 1 (satu) kipas angin dinding merk mitsunichi dan 1 (satu) kipas angin berdiri merk Cosmos;
  - 3.3.3 Satu Unit Rumah di Gunakan sebagai tempat menyimpan barang dagangan seluas 14X12 M2yang terletak di Dusun Tambe Rt 18 Rw. 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Mujnah ;
- Sebelah Selatan dengan Gang ;
- Sebelah Timur dengan Rumah Ridwan ;
- Sebelah Barat dengan Rumah Fahrudin ;

3.3.4. Perincian isi rumah di RT 18 RW 08 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai berikut :

- 1) Kayu sonokling sebanyak 30 Balok ;
- 2) Lemari hiasan ,sudut dan bofet , jumlahnya 8 unit ;
- 3) Kursi sudut 2 set ;
- 4) Difan kasur 2 set ;
- 5) 1 (satu) buah meja makan ;
- 6) 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Fujitec ;
- 7) 1 (satu) unit TV merk Digitec ukuran 21 inci;;
- 8) Rak barang pecah belah ;
- 9) 1 (satu) buah mesin cuci merek Sanyo ;

3.3.5. Uang pegang gadai tanah sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) tanah terletak di watasan Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 (tiga) di atas adalah milik Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut di atas sesuai dengan angka 4 (empat) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.266,000,- ( Empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).;



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhidin, MH.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Latif** dan **Lutfi Muslih, S.Ag., MA.** masing - masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. Latif**

**Drs. H. Muhidin, MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA..**

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

ttd.

MAKASSAR

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 875.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.050.000,-
5. Penetapan Sita	: Rp. 2.250.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 4.266.000,-

(Empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Jabatan: Ketua pengadilan Agama Bima kelas IB

Alamat:

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan conservatoir beslag atas harta bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB perspektif hukum Islam (studi putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm).

Dengan saudari:

Nama : Anita Andriani

NIM : 10100114094

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Peradilan

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

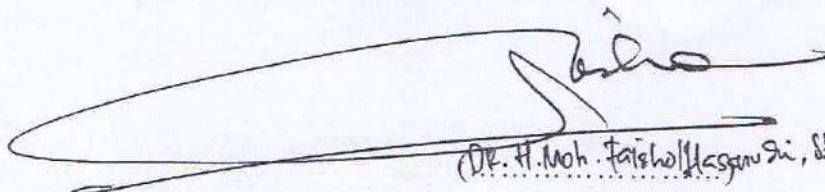
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Bima, 12 Juli 2018

Narasumber



(Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Drs. H. Muhidin, MH.

Jabatan: Ketua Majelis (wakil ketua pengadilan Agama Bima kelas IB).

Alamat: jln. Kesraaya No. 160 Perumnas Ampenan Matran

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan conservatoir beslag atas harta bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB perspektif hukum Islam (studi putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm).

Dengan saudari:

Nama : Anita Andriani

NIM : 10100114094

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Peradilan

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGÈRI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Bima, 12 Juli 2018

Narasumber



(Drs. H. Muhidin, MH)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: *Sulayman. Stt*

Jabatan: *jurusa*

Alamat: *Sadiri I Kel. Sadiri Kota Bm*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan conservatoir beslag atas harta bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB perspektif hukum Islam (studi putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm).

Dengan saudara:

Nama : Anita Andriani

NIM : 10100114094

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Peradilan

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Bima, Juli 2018

Narasumber

*[Signature]*  
*Sulayman. Stt*



Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bima kelas IB, (Bima, 12 Juli 2018)



Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima kelas IB Selaku Ketua Majelis Hakim dalam PerkaraNo.615/Pdt.G/2017/PA.Bm. (Bima, 13 Juli 2018)





## PENGADILAN AGAMA BIMA

### KELAS I-B

Jalan Gatot Subroto Raba-Bima Tlp. (0374) 43209 Fax. 45156  
Website : [www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id) Email : [bima\\_pa@yahoo.co.id](mailto:bima_pa@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22-A5/909/BP.02/VII/2018

Ketua Pengadilan Agama Bima menerangkan bahwa :

Nama : ANITA ANDRIANI  
NIM : 10100114094  
Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Samata Gowa

Telah mengadakan Penelitian sebagai salah satu syarat penyelesaian Skripsi dengan Judul:

“ PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI  
PUTUSAN NO.615/Pdt.G/2017/PA.BM ) “

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Bima, 27 Juli 2018



Dr. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN, S.H., M.H.

Nip. 19631109.199103.1.004

## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No.615/Pdt.G/2017/PA.Bm)", yang disusun oleh Anita Andriani, NIM: 10100114994, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekehuargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Makassar, 31 Juli 2018 M  
18 Dzulkaidah 1439 H

Penguji I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Penguji II : Dr. Musyifah Ilyas, M.H.I.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003



## PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan 615/Pdt.G/2017/PA.Bm)" yang disusun oleh Anita Andriani, NIM: 10100114094, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 25 Dzulqaidah 1439H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, dan disetujui untuk dimunagasyahkan.

Makassar, 10 Agustus 2018 M  
28 Dzulqaidah 1439H

Penguji I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Penguji II : Dr. Musyifah Ilyas, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.

Disetujui oleh:  
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 615/PDT.G/2017/PA.BM)**” bernama lengkap Anita Andriani, NIM: 10100114094, anak Pertama dari dua bersaudara dari Bapak M.Ali Ahmad dan Ibu Rukayah. Lahir pada tanggal 08 Juli 1997, di Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima NTB. Peneliti mengawali jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Inpres Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima pada tahun 2003-2008. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bolo Kab. Bima dari tahun 2008-2011. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bolo Kab. Bima tahun 2011-2014. Dan pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan Peradilan. Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan juga sebagai kader Taekwondoin Indonesia UKM UIN Alauddin Makassar.